

Tujuan
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Indikator Kinerja
1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Opini BPK

Sasaran
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah
Indikator Kinerja
1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD
3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI
4. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran
Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan operasional perkantoran
Indikator Kinerja
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja
Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja
Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja
Persentase fasilitasi pengadaan BMD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja
Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja
Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja
Prosentase penyaluran dana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Indikator Kinerja
Prosentase Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan yang terintegrasi

Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran
Mempertahankan kualitas penganggaran, penatausahaan, dan laporan keuangan daerah
Indikator Kinerja
1. Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD
2. Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD
3. Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD
4. Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Indikator Kinerja
Prosentase ketetapan waktu penyusunan Anggaran SKPD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Indikator Kinerja
Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja
Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
Indikator Kinerja
Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja
Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD